



IMPLEMENTASI HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT DI SMP NEGERI 10 KABUPATEN LEBONG (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF)

¹Tenti Murni (SMPN 22 Lebong)

Email : tentimurni79@gmail.com

²Manap Somantri (FKIP UNIB)

Email : manap@unib.ac.id

Abstrak - Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: Analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program, menyusun pembagian tugas, melaksanakan kegiatan humas dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong. Penelitian melakukan deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah komite, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Pengumpulan data dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan program hubungan sekolah dan masyarakat belum menekankan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun. Sekolah tidak menyusun bantuan masyarakat dalam bentuk fisik dan financial dikarenakan adanya perintah bupati tentang larangan pungutan untuk kegiatan sekolah. Saran penyusunan program sebaiknya berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dengan menekankan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dalam jangka waktu lima tahun pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan humas hendaknya dalam bentuk tim.

Kata Kunci : Implementasi, Sekolah, Masyarakat

Abstrak - The research objective is to describe: analyzing school needs, compiling programs, compiling job descriptions, carrying out public relations activities in school and community relations at SMP N 10 Lebong Regency. This research is descriptive using a qualitative descriptive approach. The research subjects were the committee, teachers, principals, and vice principals. Collecting data with interview techniques, observation and documentation. The results showed that the preparation of a school and community relationship program had not emphasized the process of determining future activities by managing various resources effectively and efficiently to achieve optimal results in accordance with predetermined goals, in the long term, namely for 5 years. Schools do not arrange community assistance in physical and financial form due to the district head's order regarding the prohibition of levies for school activities. Suggestion preparation of programs should be based on an analysis of school needs by emphasizing the process of determining future activities within a period of five years distribution of tasks and implementation of public relations activities should in team form

Key Words: Implementation, School And Community Relations



PENDAHULUAN

Kepmendiknas nomor 044/u/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Berfungsi sebagai: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengontrol (4) mediator.

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam membantu sekolah memenuhi kebutuhan sekolah. Beberapa bentuk peran serta masyarakat antara lain: menggunakan jasa pelayanan yang tersedia; memberikan kontribusi dana, bahan, tenaga dan konsultasi; serta pengambilan keputusan (Kemendikbud, UNICEF dan UNM, 2013: 2)

Program manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi yang luas pada sekolah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pembelajaran nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya cocok prioritas kebutuhan, dan juga lebih paham terhadap kebutuhan setempat.. Dengan otomoni, sekolah dapat lebih memberdayakan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar (Saiful Sagala, 2010).

Manajemen Berbasis Sekolah ialah suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya tingkatan kualitas pembelajaran di tingkatan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Dirjen Dikdasmen(2001) kalau Manajemen Berbasis Sekolah ialah wujud alternative pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pembelajaran, yang diisyaratkan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas ditingkat sekolah, partisipasi warga yang relatif besar, dalam rangka Kebijakan Pembelajaran Nasional”.

Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut kepemimpinan kepala sekolah handal yang ada keterampilan manajerial serta integritas individu untuk mewujudkan visi sebagai aksi, dan juga demokratis serta transparan dalam berbagai pengambilan keputusan(Mulyasa, 2004).

Kedudukan warga dalam pembelajaran, yang sepanjang ini digiatkan dalam manajemen sekolah tercermin dalam Keputusan Menteri

Pembelajaran Nasional No 044/ U/ 2002 tentang Dewan Pembelajaran serta Komite Sekolah.. Komite Sekolah berfungsi sebagai: (1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2000)

Kerjasama sekolah dan masyarakat harus ada pelaksanaan, apa yang telah direncanakan bersama antara masyarakat dan sekolah kerjasama yang telah disusun personilnya melaksanakan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Peran masyarakat dalam membantu sekolah adalah salah satu kewajiban yang secara formal disyahkan oleh negara, setiap warga Negara wajib berpendidikan, dan warga Negara harus menyekolahkan putra-putrinya. Keikutsertaan masyarakat dalam manajemen sekolah sebagai badan perwakilan sekolah yang diwakili komite sekolah dapat berpartisipasi pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Kebersamaan dan kerjasama ini akan menjadi salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Partisipasi orang tua dan warga masyarakat dalam membangun dunia pendidikan di daerahnya salah satu bentuk sumbangsih yang akan sangat berarti bagi penyelenggaraan sekolah untuk menjadikan putra-putri masyarakat menjadi warga masyarakat yang terdidik cerdas dan berpancasila. Bantuan masyarakat yang diberikan dalam pengelolaan pendidikan dapat berupa fisik misalnya untuk menyediakan sarana dan prasarana, atau non fisik, misalnya saran, usulan dan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian penyelenggara pendidikan “warga serta masyarakat sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu butuh dioptimalkan. Kian besar tingkatan partisipasi, kian besar rasa mempunyai, makin besar rasa tanggung jawab serta



kesimpulannya kian besar pula tingkatan dedikasinya (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007: 5).

Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat mengikuti perubahan- perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, mengizinkan sekolah tetapi populer serta utuh. Karena terletak dalam hidup bersama dengan masyarakat, sekalian sebagai inovator bagi masyarakat. Sekolah mutlak memerlukan adanya hubungan dengan masyarakat, yaitu sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk melayani masyarakat

Di dalam kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat yang dimaksud masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masyarakat orang tua siswa (orang tua memiliki anak yang sedang sekolah), masyarakat yang terorganisasi, dan masyarakat secara luas. Masyarakat yang terorganisasi misalnya kelompok-kelompok organisasi bisnis, politik, sosial, keagamaan dan sebagainya. Masyarakat secara luas bisa berupa pribadi-pribadi, dan masyarakat secara umum.

Komunikasi sekolah dan masyarakat merupakan unsur yang harus dilakukan dalam pengelolaan kerjasama untuk membangun kualitas sekolah. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai pemikiran untuk membangun sekolah mulai dari perencanaan yang dikembangkan sekolah, masyarakat sudah mengemukakan ide-ide, saran-sarannya dan dukungan moral serta dukungan materialnya. Kewajiban sekolah untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat menjadi sangat penting, peran masyarakat dalam memonitoring pelaksanaan program-program sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah, serta peran serta dalam penilaian kegiatan sekolah secara akurat akan memberikan dampak positif untuk membangun kualitas pendidikan di sekolah.

Ikhwann(2018) mengungkapkan bahwa manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses hubungan sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan sekolah untuk memenuhi berbagai kegiatan pendidik para siswa

dari masyarakat itu sendiri baik secara fisik maupun non fisik. Kebutuhan sekolah baik sarana dan prasarana atau kebutuhan lainnya untuk tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya masih dirasakan kurang dari anggaran pemerintah yang disediakan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk itu kerjasama antara sekolah dan masyarakat akan sangat membantu.

Dengan ada hubungan yang saling memberi dan menerima antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya maka sekolah harus merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan warga masyarakat tersebut secara total, integrated, dan optimal karena sekolah member sesuatu yang sangat berharga terhadap masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah salah satu program yang harus dilakukan sekolah. Untuk itu sekolah terutama sekolah atau kepala sekolah harus manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, agar sekolah dapat melaksanakan program sekolah dengan bantuan masyarakat dan masyarakat akan lebih mengetahui kebutuhan sekolah dan dapat memberikan bantuan, saran dan pemecahan masalah sekolah sehingga sekolah dapat memberikan pendidikan kepada para siswa dengan baik. Bagaimana hubungan sekolah dan masyarakat dikelola oleh sekolah menjadi menarik untuk diteliti. Judul peneliti ini adalah Studi Deskriptif kualitatif Implementasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong.

Rumusan Umum: Bagaimana Implementasi hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong?

Rumusan Khusus Masalah Penelitian

1. Bagaimana sekolah menganalisis kebutuhan sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana sekolah menyusun program humas dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong?



3. Bagaimana sekolah menyusun pembagian tugas dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N10 Kabupaten Lebong?
4. Bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan humas dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong?
5. Bagaimana sekolah mengadakan pengawasan dan pelaporan dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: Implementasi Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong

Kegunaan Penelitian memberikan masukan khususnya untuk SMP Negeri 10 Kabupaten Lebong dan umumnya dunia pendidikan tentang: Implementasi hubungan sekolah dan masyarakat

Ruang Lingkup Penelitian

Berkenaan dengan: (1) Analisis kebutuhan, (2) Penyusunan program humas, (3) Menyusun pembagian tugas (4) Melaksanakan kegiatan humas (5) Pengawasan dan Pelaporan

Defenisi Konsep Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi antara sekolah dan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Deskripsi Teoririk 1. Manajemen Pendidikan Manajemen pendidikan adalah upaya memberdayakan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan dengan fungsi-fungsi yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Memimpin (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat manajemen humas meliputi: analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program humas, pembagian tugas pelaksana, pelaksanaan kegiatan humas, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan humas di sekolah. Paradigma Penelitian

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi. Metode evaluasi merupakan salah satu bentuk penelitian terapan, dengan kata lain hasil penelitian ini akan langsung bermanfaat bagi subjek penelitian (Margono, 2003). Setting penelitian ini akan berlokasi di SMP Negeri 10 Kabupaten Lebong. Subjek Penelitian Subjek Penelitian Masyarakat atau Komite, guru, kepala sekolah, siswa. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis kebutuhan sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong

a. Menyiapkan Bahan Pertemuan Humas

Kepala sekolah SMP N 10 Kabupaten Lebong telah melakukan analisis kebutuhan sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong, kegiatan ini merupakan agenda rutin minimal setiap satu tahun sekali guna menyusun berbagai kebutuhan sekolah untuk mendapat bantuan dari masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah.

Dalam menyusun program hubungan sekolah dan masyarakat sekolah belum menekankan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan tidak mengupayakan program dibuat dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun tidak juga ada dokumen yang dapat dipelajari untuk menunjukkan hal ini. Program yang ada hanya dalam jangka pendek 1 tahun.



Direktorat Tenaga Kependidikan (2007: 6) mengemukakan, “Perencanaan program pada dasarnya merupakan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pembuatan program ada aktivitas merumuskan program, merumuskan indikator keberhasilan, menetapkan kegiatan, merinci kegiatan, dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Program diupayakan dibuat dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Rumusan program yang matang akan menghasilkan suatu program kerja yang efektif sesuai dengan visi dan tujuan yang akan dicapai dan misi yang diemban oleh lembaga yang bersangkutan”.

Tugas dilakukan kepala sekolah dalam kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat adalah: (1) merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan oleh kepala sekolah, (2) memberikan informasi tentang kegiatan kehumasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah, (3) merekam kondisi yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah, (4) melakukan berbagai teknik kehumasan, (5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Sekolah tidak menyusun bantuan masyarakat dikarenakan adanya surat Surat Bupati Lebong Tanggal 27 Desember 2016 Kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Hal: Perintah yang menginformasikan adanya pungutan yang dilakukan sekolah pada wali murid dengan dalih dan alasan untuk kepentingan pendidikan. Berdasarkan data yang ada pada kami ada 58 (lima puluh delapan) jenis pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan atau komite. Mempedomani Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas bersih Pungutan Lian, dengan ini diperintahkan kepada Saudara agar melarang pihak sekolah atau komite sekolah melakukan pungutan liar sebagaimana yang telah kami jelaskan.

hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dan warga sekolah dalam memberikan bantuan fisik dan financial khususnya sehingga untuk mewujudkan sekolah yang bermutu jadi kurang dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat dan warga sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu perlu dimaksimalkan. Makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa tanggung jawab dan akhirnya makin besar pula tingkat dedikasinya (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007: 5).

Program humas di sekolah memperhatikan beberapa persyaratan, yaitu: (1) program dibuat untuk setiap tahun, (2) program didasarkan pada hasil analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta data-data pendukung lainnya), (3) kegiatan yang diprogramkan merupakan kegiatan yang sangat urgen dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah, (4) program yang dilaksanakan mempunyai tujuan yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan lainnya, (5) program kegiatan mampu membangun citra positif bagi nama baik sekolah dan bagi masyarakat sekolah.

Salah satu yang belum terlihat di sekolah adalah program hubungan sekolah dan masyarakat adalah pada hasil analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta data-data pendukung lainnya). Hal ini memperlihatkan kurang matangnya program hubungan sekolah dibuat, Direktorat Tenaga Kependidikan, (2007: 6) menjelaskan, Analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi pengelola sekolah dalam kerangka hubungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat mau membantu sekolah apabila mereka merasakan kebutuhannya terpenuhi. Demikian juga sekolah memiliki sejumlah kebutuhan pemecahan masalah dan pengembangan lembaga yang pemenuhannya perlu melibatkan masyarakat. Untuk itu perlu kegiatan analisis kebutuhan pemecahan masalah



yang melibatkan masyarakat dan analisis kebutuhan pengembangan lembaga yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pengelola kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah dengan alasan kepala sekolah sibuk maka didelegasikan kepada guru yang ditugasi sebagai Wakil Kepala Sekolah. SMPN 10 Lebong memiliki 4 Wakil Kepala Sekolah yaitu Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, dan Waka Humas. Tiap-tiap wakil memiliki tugas masing-masing sebagai pembantu dari tugas Kepala Sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sebagai Waka Humas yang membantu Kepala Sekolah untuk mengelola, mengendalikan, dan mengatur sistem di SMPN 10 Lebong, maka dibuatlah Program Kerja Waka Humas SMPN 10 Lebong Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dalam dokumen tidak dijelaskan tugas masing-masing wakil kepala sekolah sehingga membuat kebingungan untuk mengetahui siapa tugas apa. Direktorat Tenaga Kependidikan, (2007: 7) dijelaskan, Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembagian tugas pelaksana perlu dilakukan agar semua kegiatan yang harus dilakukan ada yang bertanggung jawab melaksanakannya. Secara umum kebijakan terkait bidang kehumasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tugas dilimpahkan kepada guru, tenaga administrasi sekolah.

Para wakil kepala sekolah sudah mengadakan analisis kebutuhan sekolah dalam hubungan sekolah dan masyarakat di SMP N 10 Kabupaten Lebong, pertama membuat persiapan untuk melakukan pertemuan humas, ini pertama dilakukan dengan para wakil kepala sekolah yaitu: 4 Wakil Kepala Sekolah yaitu Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, dan Waka Humas. Kemudian setelah pertemuan diketahui hasil pertemuan dapat mengetahui akan kebutuhan sekolah pada tahun 2020-2021.

Penyusunan program hubungan sekolah dan masyarakat hanya disusun untuk satu tahun dan belum mendalami tentang isi program. Seharusnya, "Program diupayakan dibuat dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun dan jangka

pendek 1 tahun. Rumusan program yang matang akan menghasilkan suatu program kerja yang efektif sesuai dengan visi dan tujuan yang akan dicapai dan misi yang diemban oleh lembaga yang bersangkutan (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007: 7)

2. Melakukan Kordinasi Dengan Komite Sekolah

Pengelola hubungan sekolah dan masyarakat melakukan kordinasi dengan komite sekolah, melakukan relasi sosial dengan komite sekolah dan masyarakat desa di wilayah kecamatan Lebong Utara dan sekitarnya dalam bentuk kerjasama dua arah berkaitan dengan pendidikan, sehingga terjalinnya hubungan baik dengan komite sekolah dan masyarakat Kecamatan Lebong Utara dan sekitarnya, terutama yang terdapat siswa-siswi SMP Negeri 10 Lebong. Bahkan kami melakukan relasi sosial dengan pemerintah desa sampai kabupaten dan instansi terkait terutama untuk penggalan dana dan proyek kegiatan sekolah, terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah Kecamatan Lebong Utara, dan Pemda Kabupaten Lebong, melakukan relasi sosial dengan pihak sekolah terutama SD dan MI terutama dalam upaya penerimaan siswa baru, terjalinnya hubungan baik dengan SD/MI, SMP/SMA sederajat terutama di wilayah Lebong utara, dan Pemda Kabupaten Lebong pada umumnya.

Dalam melakukan kordinasi dengan komite sekolah dan yang lainnya sekolah telah melakukannya, namun dengan swasta mungkin belum. Direktorat Tenaga Kependidikan, (2007: 6), menjelaskan Sekolah dapat memerankan fungsinya secara maksimal bila didukung oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu keluarga, pemerintah dan masyarakat. Sementara ini secara umum yang sudah relatif berjalan baik yaitu keterlibatan keluarga (orang tua siswa) dan pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pihak masyarakat dan swasta belum optimal keterlibatannya. Untuk mengelola pendidikan, sekolah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini



pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong dan atau mengatur kerja sama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan dunia pendidikan.

3. Membentuk Tim Kerja Hubungan sekolah dan Masyarakat

Pembentuk tim kerja hubungan sekolah dan masyarakat SMP N 10 Lebong berisikan 4 Wakil Kepala Sekolah yaitu Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, dan Waka Humas. Tiap-tiap wakil memiliki tugas masing-masing sebagai pembantu dari tugas Kepala Sekolah. dalam kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Bentuk operasional kegiatannya adalah: (1) Akademik, memperhatikan dan menilai tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas maupun kuantitas), penelitian, karya ilmiah (lokal, nasional, internasional), jumlah dan tingkat keserjanaan pendidikannya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan atau Pusat Sumber Belajar, Sumber Belajar yang mutakhir serta teknologi instruksional yang mendukung Proses Belajar Mengajar, termasuk ukuran prestasi dan prestise-nya (2) Sarpras, menganalisis kebutuhan gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.(3) Sosial, menyelenggarakan berbagai partisipasi SMP Negeri 10 Lebong dengan masyarakat sekitarnya, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.

Dalam membentuk tim kerja hubungan sekolah dan masyarakat dideskripsikan secara umum belum terlihat organisasi alur kerja yang jelas. Kemendikbudan, Unicef dan Universitas Negeri Malang (2013, 7) menjelaskan, Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembagian tugas pelaksana perlu dilakukan agar semua kegiatan yang harus dilakukan ada

yang bertanggung jawab melaksanakannya. Secara umum kebijakan terkait bidang kehumasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tugas dilimpahkan kepada guru, tenaga administrasi sekolah.

1. Penyusunan Program Hubungan Sekolah dan Masyarakat

a. Melakukan Analisis SWOT

Analisis SWOT yang dilakukan diantaranya membuat perencanaan, yang pertama mengadakan persiapan dengan mengadakan Konsultasi penyusunan program hasil yang diharapkan memperoleh masukan yang berguna dalam menyusun program, kemudian inventaris permasalahan untuk mengetahui jenis permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program, penyusunan program kerja urusan humas, terlaksananya kegiatan Humas secara tertib dan lancar sesuai rencana, penyusunan anggaran pembiayaan keseluruhan kegiatan urusan, dan Pembiayaan setiap program kegiatan didasarkan atas anggaran.

Sekolah belum dapat melakukan analisis SWOT dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi belum terlihat analisis swot yang seharusnya, Langkah-langkah penyusunan program humas di sekolah meliputi: (1) merumuskan indikator keberhasilan; (2) menetapkan kegiatan; (3) merinci kegiatan; (4) menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan; (5) menyusun personel yang bertugas; (6) menyusun anggaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan (Kemendikbudan, Unicef dan Universitas Negeri Malang 2013, 14)

Peran komite sekolah sebagai agen pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan peran masyarakat dalam humas untuk pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah berupabantuan fisik tidak berfungsi karena Kebijakan pemerintah daerah dengan surat Keputusan.

b. Menentukan Program Humas

Dari hasil perencanaan didapatkan program yang dilakukan yaitu: Promosi kegiatan ekstarakurikuler, mempresentasikan Visi-



Misi SMP Negeri 10 Lebong ke SD/MI di wilayah Sekitar SMP Negeri 10 Lebong, mensosialisasikan kepada wali murid siswa kelas VII (peserta didik Baru) tentang visi misi serta kegiatan kegiatan di sekolah, memepresentasikan tentang Sistem dan Proses Pengusulan Kartu Indonesia Pintar, mensosialisasikan kepada wali murid siswa kelasVII (Peserta Didik Baru) tentang visi misi serta kegiatan kegiatan di sekolah, Memepresentasikan tentang Sistem dan Proses Pengusulan Kartu Indonesia Pintar. Pertemuan Orang Tua/Wali Murid (Kepala Sekolah & Komite Sekolah), membantu merencanakan pertemuan Kepala Sekolah & Komite Sekolah. Membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pertemuan Kepala Sekolah & Komite Sekolah, pertemuan dengan tujuan membahas tentang evaluasi siswa , kegiatan ujian dan lainnya, Komunikasi dengan Masyarakat sekitar terkait kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan, Memfasilitasi Rapat Internal Sekolah.

Sehubungan dengan SK Bupati maka tidak dapat diprogramkan “Jenis-jenis peran serta masyarakat di sekolah meliputi: (1) bantuan fisik: pembangunan sarana dan prasarana sekolah, (2) bantuan fisik: perawatan sarana dan prasarana sekolah, (3) bantuan non-fisik: memotivasi siswa untuk giat belajar, (4) bantuan non-fisik: mengidentifikasi anak yang putus sekolah serta, (5) endorog dan membantu keluarga mereka supaya masuk sekolah (Kemendikbud, Unicef dan Universitas Negeri Malang, 2013, 14)

c. Merumuskan Tujuan

Tujuan dirumuskan oleh kepala sekolah dan waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, dan waka humas, guru-guru dan tenaga pendidik lain, komite, dan anggota masyarakat atau tokoh, serta perwakilan siswa.

Tujuan dari program urusan hubungan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerja sama antar warga sekolah, 2. Meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasa memiliki dan

tanggungjawab keberadaan sekolah, 3. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, komite sekolah sehingga bersama-sama berperan aktif dengan maju mundurnya sekolah, 4. Menjalin kerjasama dengan alumni, 5. Menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga keamanan sekolah dapat terpelihara dengan baik, 6. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan jiwa persaudaraan, kebangsaan dan persatuan.

Tujuan manajemen humas yang dirumuskan telah sesuai dengan pedoman yang ada yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan sekolah, praktik pendidikan dan keterlibatan masyarakat melalui pengaturan kerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di sekolah.

d. Menentukan Nilai Tambah Program

Nilai tambah hubungan sekolah dan masyarakat adalah mampu untuk menjembatani keterlibatan seluruh anggota masyarakat, dan sekolah, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta untuk ikut peduli dalam mengoptimalkan kemampuan dan kerjasama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, adanya program kerja hubungan sekolah dan masyarakat dapat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sekolah sesuai dengan Visi Misi Sekolah.

Nilai tambah hubungan sekolah dan masyarakat dipparka Priansa dan Setiana (2018: 124) Subtansi Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian dimasukan (insert) utamanya ke dalam Pasal 56 ayat 1 Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

4. Menentukan hasil kegiatan humas

Hasil yang diharapkan dari kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat antara lain: Memperoleh masukan yang berguna dalam menyusun program, diketahuinya jenis



permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program, terlaksananya kegiatan Humas secara tertib dan lancar sesuai rencana, tersedianya pembiayaan setiap program kegiatan didasarkan atas anggaran masyarakat.

Purwanto Ngalim (2001; 188) mengemukakan, "Ditinjau dari kepentingan pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk; (1) memelihara kelangsungan hidup sekolah, (2) meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, (3) memperlancar kegiatan proses belajar mengajar, (4) memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

a. Pembagian tugas

Yang ditugaskan untuk merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan humas adalah para wakil kepala sekolah yaitu waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, dan waka humas. tiap-tiap wakil memiliki tugas masing-masing sebagai pembantu dari tugas kepala sekolah di SMPN 10 Lebong yaitu:

Tugas Waka Humas antara lain sebagai: 1. Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua, 2. Memelihara hubungan baik dengan komite sekolah, 3. Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional, 4. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi (majalah, surat kabar dan mendatangkan sumber), 5. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem Waka Humas ditetapkan dan dipelihara, 6. Melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang kinerja Waka Humas dan kebutuhan untuk perbaikan, 7. Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan Waka Humas, sehingga tercipta kinerja yang baik. 8. Mengontrol kedisiplinan, efektifitas, dan pelaksanaan serta pemeliharaan sistem

dan pendokumentasian, dan 9. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Sekolah.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan ternyata ada ketidak jelasan dalam pembagian tugas setiap wakil kepala sekolah di SMPN 10 Kabupaten Lebong untuk setiap kegiatan. Sehingga para wakil kepala sekolah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai TUPOKSI-nya masing-masing.

Sebagaimana yang tercantum dalam Kemendikbud, Unicef dan Universitas Negeri Malang, (2013, 7) Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembagian tugas pelaksana perlu dilakukan agar semua kegiatan yang harus dilakukan ada yang bertanggung jawab melaksanakannya. Secara umum kebijakan terkait bidang kehumasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dan tidak dijelaskan setiap waka apa tugasnya,

b. Menyusun cara-cara memperoleh bantuan masyarakat

Bagaimana menyusun cara-cara memperoleh bantuan masyarakat?

Jawab: Ya, bantuan fisik dan non fisik secara materi tidak lagi kami susun karena Surat Bupati Lebong Tanggal 27 Desember 2016 Kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas bersih Pungutan Lian, dengan ini diperintahkan kepada Saudara agar melarang pihak sekolah atau komite sekolah melakukan pungutan.

Yang kami lakukan diantaranya: Konsultasi penyusunan program untuk memperoleh masukan yang berguna dalam menyusun program, melakukan inventarisasi permasalahan sehingga diketahuinya jenis permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program, penyusunan program kerja urusan humas. Diharapkan terlaksananya kegiatan Humas secara tertib dan lancar sesuai rencana. Melakukan promosi, melakukan sosialisasi ekstarakurikuler, mempresentasikan Visi-Misi SMP Negeri 10 Lebong ke SD/MI di wilayah sekitar SMP Negeri 10 Lebong.



- Sosialisasi kepada wali murid siswa kelas VII (peserta didik Baru) tentang visi misi serta kegiatan kegiatan di sekolah, memepresentasikan tentang Sistem dan Proses Pengusulan Kartu Indonesia Pintar. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa di SMPN 10 Kabupaten Lebong tidak lagi memperoleh bantuan secara finansial dari komite sekolah hal ini disebabkan adanya surat edaran bupati lebong tentang saber pungli sehingga sekolah hannya mendapatkan bantuan berupa non fisik dari
- c. Memberikan informasi tentang kegiatan kehumasan kepada masyarakat atau pihak-pihak

Wakil Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya,
2. Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya,
3. Membantu Kepala Sekolah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu,
4. Membantu Kepala Sekolah dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi,
5. Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan,
6. Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama,
7. Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan,
8. Menunjukkan pergantian keadaan melalui pendapat umum,
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Humas secara berkala.

Wakil kepala sekolah bagian humas mempunyai tugas membantu kepala sekolah seperti diatas, hal ini sesuai dengan

- d. Merekam kondisi yang berkembang dalam masyarakat
- Rekaman tentang kondisi yang berkembang diantaranya adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan atau yang telah direncanakan dan dilaksanakan, sejauh ini rekaman yang lainnya belum ada.
- Berkenaan dengan rekaman kondisi yang berkembang dalam masyarakat Kemendikbud, Unicef dan Universitas Negeri Malang, (2013; 17) mennyatakan, Sekolah mengadakan buku-buku kegiatan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dengan benar yang terdiri atas: Buku Program Kerja Humas, Buku Deskripsi Tugas Personel Humas, Buku Daftar Hadir Rapat bersama Masyarakat/*Stakeholders*, Buku Notulen Rapat bersama Masyarakat/*Stakeholder*, Buku Catatan Kerjasama dengan Masyarakat, Buku Kegiatan Humas, Buku Komite Sekolah (Struktur Organisasi, Deskripsi Kerja, Program Kerja, Kegiatan)
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan humas Laporan dilakukan dengan mengkomunikasikan secara periodik kepada pimpinan atau setelah kegiatan dilakukan dan mengkoordinasikan secara keseluruhan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada pimpinan.
- Laporan pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat belum ditata seperti seharusnya, karena apa yang dilakukan dengan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat seharusnya, "Terkait kegiatan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan humas, ketentuannya sebagai berikut: (1) Adanya bukti tertulis adanya kegiatan humas diawasi, dievaluasi dan dilaporkan secara memadai, (2) Kegiatan humas terlaksana sesuai dengan rencana, (3) Pengawasan kegiatan humas dilakukan oleh kepala sekolah bersama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, orang tua siswa, pengurus komite



sekolah, dan *stakeholders* lainnya, (4) Evaluasi yang dilakukan bisa berbentuk saran melalui angket, komunikasi langsung melalui dialog dengan tokoh masyarakat, orang tua murid ataupun organisasi masyarakat yang ada di sekitar sekolah, (5) Hasil evaluasi dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kualitas hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007)

PENUTUP

KESIMPULAN

Perencanaan dibuat untuk satu tahun belum merencanakan untuk jangka panjang, penyusunan program humas dilakukan dengan membuat dengan menekankan pada kegiatan ekstrakurikuler dan kemasyarakatan sehubungan *Surat Bupati Lebong Tanggal 27 Desember 2016 Kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan mempedomani Praturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016* pembagian tugas untuk merencanakan, humas diberikan kepada wakil kepala sekolah yaitu waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, dan waka humas, namun belum jelas rincian tugasnya. melaksanakan kegiatan humas lebih banyak dilakukan oleh wakil sekolah bidang humas dan belum tertata denag baik, laporan pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat belum ditata seperti seharusnya.

SARAN : Penyusunan program hubungan sekolah dan masyarakat sebaiknya berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dengan menekankan proses penetapan kegiatan di masa akan datang, perencanaan Humas sebaiknya disusun dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun, pembagian tugas hendaknya dalam bentuk tim, melaksanakan kegiatan humas sebaiknya

dilakukan bersama warga sekolah dan masyarakat oleh tim yang dibentuk sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Ikhwan, A. (2018). Penerapan Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 2(1), 1-16.
- Praturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 *tentang satuan Tugas bersih Pungutan Liar*.
- Kepmendiknas nomor 044/u/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah
- Kemendikbud, Unicef Dan UNM, 2013, *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*
- Kemendikbud. 2016, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, Jakarta, Dirjen Dikdasmen
- Kemendikbud. 2017, *Indikator Mutu Pendidikan*, Jakarta, Dirjen Dikdasmen
- Margono, S. 2003. *Metode penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset